

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Ganti Sembako dengan Uang Tunai

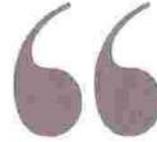
JAKARTA-Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Penyaluran BLT tersebut dapat melalui pemberian tunai atau transfer melalui bank.

Menurut Mujiyono, ususal ini berkaca dari pengalaman bansos dalam bentuk paket sembako pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama. "Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan bansos tahap pertama yang menyebabkan bansos tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Bansos tahap pertama direncanakan selesai pada 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan 24 April 2020," ujar Mujiyono, di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Mujiyono menyebutkan, terdapat dua kendala dalam penyaluran bansos berupa paket sembako. Pertama, penyedia bahan kebutuhan, yakni Perumda Pasar Jaya dan mitra terkait seperti Transmart dan Lottemart kesulitan menyediakan paket kebutuhan, karena kendala suplai barang dan hambatan teknis lainnya.

"Kedua, ada kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos, misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya," ungkap dia.

Oleh karena itu, kata Mujiyono, lebih baik Pemprov DKI mempertimbangkan bansos diberikan dalam bentuk BLT atau transfer tunai. Menurut dia, terdapat sejumlah keuntungan dengan bansos dalam bentuk BLT atau transfer. Keuntungan itu antara lain, pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung. Kemudian, biaya distribusi dan pengemasan



Keuntungan lain, adalah warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19."

Mujiyono
Ketua Komisi A DPRD
DKI Jakarta

barang bisa dihemat, sehingga jumlah bantuan yang diterima lebih maksimal.

"Keuntungan lain, adalah warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19. Pemberian dalam bentuk uang tunai akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat menghidupkan perekonomian kecil di sekitar tempat tinggalnya, seperti warung kecil, warung makan, dan sebagainya," jelas dia.

Langsung Transfer

Menurut Mujiyono, skema BLT dalam bentuk transfer bank atau diberikan secara tunai, pertama, Dinas Sosial/kelurahan/RW meminta data nomor rekening dari salah satu anggota keluarga dari 1.194.633 keluarga penerima bantuan, atau warga lain yang menjadi penerima bantuan.

Kedua, untuk keluarga yang memiliki nomor rekening, bantuan diberikan secara tranfer dan bagi keluarga yang tidak memiliki nomor rekening, maka bantuan diberikan secara tunai. Ketiga, pemberian BLT dilakukan selama satu bulan dengan total bantuan tunai yang diberikan sebesar Rp 598.000 (Rp149.500 X 4). Keempat, penguatan pengawasan penerima bantuan dapat dilakukan dengan memublikasikan nama-nama penerima sosial di kantor

kelurahan, balai RW, maupun melalui portal media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kelima, disediakan sebuah hotline khusus untuk melaporkan penyimpangan pemberian BLT terhadap pemberian bantuan sosial tersebut. "Keenam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak Polri dan kejaksanaan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam pemberian bantuan sosial tersebut," cetus Mujiyono.

Dikatakan, pemberian BLT ini tentunya mengasumsikan bahwa penerima bantuan akan keluar rumah untuk membeli barang kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, kata dia, penerapan protokol Covid-19 di tempat tinggal harus diterapkan lebih tegas.

"Bahkan apabila diperlukan dikenakan sanksi pencabutan bantuan sosial, jika keluarga penerima bantuan tersebut tidak mematuhi protokol Covid-19 di lingkungan tempat tinggalnya," tegasnya.

Selain itu, kata Mujiyono, Pemprov DKI Jakarta perlu menjamin kestabilan harga-harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar, terutama di kawasan padat penduduk dan ekonomi lemah. Pelaksanaan operasi pasar harus menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, yakni



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Ganti Sembako dengan Uang Tunai

dengan menjaga jarak aman.

"Penyediaan masker kain harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dan dimasifkan penggunaannya di masyarakat dengan memberikan masker secara gratis untuk seluruh warga DKI Jakarta. Jika saat ini ada sebanyak 11.063.324 warga DKI Jakarta dan masing-masing diberikan 2 buah masker @ Rp 5.000, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 110 miliar," pungkasnya.

Warga Puas

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) dalam surveinya mengklaim mayoritas warga puas atas respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 dengan persentase 80,70 persen, sementara 19,30 persen lainnya tidak puas dengan alasan tertentu.

Direktur LKSP Astriana B. Sinaga, menyatakan kepuasan warga terhadap respon Pemprov DKI Jakarta dalam hal bertindak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, dukungan terhadap tenaga kesehatan yang merawat pasien, dan menyiapkan bantuan sosial bagi warga Jakarta dan pendatang yang terdampak Covid-19.

Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Pemprov, yakni kurang cepat pelayanan (54,07 persen), kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70 persen). "Survei persepsi warga perlu dilakukan secara berkala, termasuk dalam suasana darurat kesehatan tersebarnya wabah. Agar kita mengetahui kondisi nyata dan persepsi warga terhadap kondisi yang berkembang," kata Astriana.

Survei LKSP dilakukan pada 14-18 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta (44 kecamatan) yang melibatkan 886 responden yang dimintai pendapatnya berusia 17 tahun ke atas.

Penentuan jumlah responden menggunakan metoda Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.829 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten/kota. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyebut survei tersebut menggambarkan kondisi yang sebenarnya saat ini. Namun menurutnya perlu diberikan catatan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait persepsi masyarakat mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemprov DKI sebesar 19,03 persen.

"Jika dilihat lagi lebih merupakan kewenangan pusat," kata Yani. Kinerja pemprov DKI sendiri, menurutnya sudah maksimal dalam usaha pencegahan Covid-19. Pemprov sudah mulai melakukan usahanya sejak Januari 2020 dengan terlibat pemantauan penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Wuhan. Kemudian disusul pemprov juga mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan Februari.

"Pemprov DKI juga, sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah Covid-19. Sehingga kebijakan terkait pencegahan bisa lebih responsif jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Sayangnya kewenangan pemprov DKI sangat terbatas," ucap dia.

Sedangkan menurut Yani kekurangan Pemprov DKI, terletak pada sangat terbatasnya jumlah SDM. Padahal yang diperlukan dalam penanganan Covid-19, SDM sangat besar dalam waktu yang sangat terbatas. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya kesan lamban meski sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta telah bekerja dengan baik.

"Sebagai contoh, pembagian sembako untuk warga terdampak. Secara mekanisme sudah sangat baik dengan melibatkan RW dan RT dan diantarkan langsung ke rumah warga sehingga tidak terjadi kerumunan. Namun jumlah yang dibagikan masih terbatas, bukan karena logistik yang terbatas namun lebih kepada pendataan warga yang terdampak," kata dia.

"Sehingga Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menggunakan data KJP Plus dan kartu Jakarta lansia dengan menyiapkan 1,2 juta paket sembako. Namun ini pun tetap ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan warga terdampak wabah Covid-19 dengan melibatkan RT dan RW," tutur Yani menambahkan.

Kesiapan Warga

Dalam survei LKSP sendiri, diketahui 90,97 persen warga Jakarta tahu penyebaran wabah Covid-19 dan bersikap waspada; 69,07 persen warga menyatakan siap menghadapi dampak Covid-19; 30,93 persen warga tidak siap dan membutuhkan bantuan berupa: sembako (49,27 persen), agar tersedia dan ongkos hidup (42,70 persen) karena penghasilan berkurang atau berhenti bekerja.

Dari enam wilayah administrasi Jakarta yakni lima kota dan satu kabupaten, tercatat responden asal Jakarta Barat (71,3 persen) dan Jakarta Selatan (70,3 persen) paling tinggi menyatakan kesiapannya. Sementara warga di Kepulauan Seribu sekitar 80,0 persen dan Jakarta Utara 35,2 persen paling tidak siap menghadapi wabah yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Bahkan bila ditelusuri lebih jauh, warga Jakarta Timur yang paling tidak siap dan memerlukan bantuan sembako paling tinggi di Kecamatan Pulogadung dan Ciracas (masing-masing 50,0 persen) serta Cakung (46,7 persen). (dni/ant)